

## BAB IV PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR TENTANG NILAI-NILAI UNIVERSAL ISLAM DALAM PANCASILA

### A. Relasi Islam dan Pancasila

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila bukanlah syariat, namun sifat-sifat yang terkandung di dalamnya sesuai dengan syariat. Ketetapan yang terkandung di dalamnya sesuai dengan aturan Islam. Sifat-sifat yang terkandung dalam Pancasila merupakan gambaran dari arsitek utama Indonesia (arsitek awal) yang sebagian besar beragama Islam, yang sangat memahami keragaman yang ada di Indonesia dan mereka mengintegrasikan standar umum Islam ke dalam Anggaran Dasar Pancasila. Oleh karena itu, sangatlah tepat untuk mengatakan bahwa Pancasila itu Islami luar biasa, karena sesuai dengan refrain di bawah ini.<sup>93</sup>

كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: “Agar kalian menjadi saksi bagi seluruh umat manusia dan agar Rasulullah menjadi saksi bagi kalian, maka kami ciptakan kalian sebagai kaum perantara.” (Qs. Al-Baqarah [2]:143).<sup>94</sup>

Sifat-sifat yang terkandung dalam Pancasila, misalnya Ketuhanan, Kemanusiaan, Solidaritas, sistem aturan mayoritas, dan Hak-Hak Sipil, merupakan sifat-sifat yang disebar luaskan, dibuat oleh para penggagas di belakang negara Indonesia yang merupakan batu permata yang sangat berharga. Nilai-nilai Pancasila ini sesuai dengan kualitas Islam. Pemahaman ini sesuai dengan pemikiran bahwa sifat keislaman dalam Pancasila adalah sesuai dengan Islam tanpa mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Spekulasi ini dengan tegas menunjukkan bahwa kualitas Islam dapat diakui di negara yang tidak bergantung pada negara Islam.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Muhammad Syamsudin, “Nilai-nilai Islam dalam Pancasila”, Nu online, [Nilai-nilai Islam dalam Pancasila | NU Online](#), diakses pada tanggal 17 April 2022,

<sup>94</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahan*, Q.S Al-Baqarah: 143,22.

<sup>95</sup> Idrus Ruslan, *Membangun harmoni kehidupan berbangsa dan berNegara dengan nilai-nilai islam yang ada di Pancasila*, TAPIS, 9, no. 2, 2013.4.

Penyelesaian negara Indonesia atas Pancasila mempertimbangkan segala hal, termasuk keragaman sosial, sosial ekonomi, dan wilayah nusantara. Pancasila diyakini memiliki pilihan untuk melambangkan sisi positif antara perlawanan keras karena kemapanan dapat menyatukan negara dari kelimpahan ras dan sosialnya. Pancasila memiliki perwujudan tegas yang kritis karena tidak luput dari ingatan kaum Islamis pada masa itu. Bagaimanapun, umat Islam harus memahami bahwa jaminan Pancasila dan bukan Islam sebagai pedoman negara tidak hanya diharapkan menjadi satu, tetapi juga karena Al-Qur'an dan Hadits tidak mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara Islam.<sup>96</sup>

Menurut Abdurahman Wahid, agama dan Pancasila tidak bisa dibedakan secara keseluruhan, karena masing-masing memiliki kapasitas yang berbeda. Pancasila memiliki kemampuan sebagai penopang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan individu yang hidup di negara sebagai warga negara, Pancasila harus memiliki pilihan untuk memenuhi kerinduan agama (termasuk Islam) dan mendukung posisi mereka secara praktis. Sementara itu, agama adalah landasan keyakinan individu dan merupakan sumber inspirasi yang memberikan keragaman dunia lain pada aktivitas mereka.

Menurut Abdurahman Wahid, hubungan antara Islam dan Pancasila sangat menguntungkan, di mana yang satu tidak bisa tinggal di Indonesia tanpa yang lain. Hubungan ini membawa Pancasila sebagai gaya hidup negara, tidak sama dengan Filsafat Negara. Dengan demikian, membatasi Islam sebagai ajaran yang tegas dengan Pancasila sebagai falsafah negara jelas tidak berdasar. Pancasila adalah konkretisasi dari pelajaran-pelajaran yang tegas tentang kehidupan bernegara. Bahwa masyarakat

---

<sup>96</sup> Kamal Rijki, *Nilai syariat aislam dalam setiap sila Pancasila*, kompasiana, 17 April 2023, [Nilai Syariat Islam dalam Tiap Sila Pancasila Halaman 1 - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/nilai-syariat-islam-dalam-tiap-sila-pancasila-halaman-1) . diakses pada tanggal 17 April 2023

Indonesia tidak terpaku pada satu agama atau perkumpulan tertentu harus diakui sepenuhnya.<sup>97</sup>

Adapun nilai-nilai syariat Islam yang terdapat dalam sila-sila Pancasila sebagai berikut:

1. Sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Sila ini merupakan sila utama dalam permintaan sila pancasila. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa jelas mengambil gagasan Islam tentang Tuhan, hal ini jelas dalam Ungkapan Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nahl:

لَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ

Artinya: *Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa (Qs. An-nahl [16]; 22)*<sup>98</sup>

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ

Artinya: *Janganlah kamu menyembah dua tuhan, hanyalah dia Yang Maha Esa (Qs. An-nahl: [16] 51)*<sup>99</sup>

Islam adalah agama yang mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Peletakan Falsafah Langit dalam sila-sila pokok Pancasila sudah selayaknya mengingatkan umat Islam telah tercipta sebagai agama nusantara yang telah menaungi eksistensi insan nusantara dari dulu hingga sekarang. Penggunaan falsafah Islam dalam ketetapan pokok Pancasila tidak berarti menutup hak hidup bagi pemeluk agama yang berbeda di Indonesia. Penerapan falsafah Islam secara tepat dalam anggaran dasar memberikan ruang hidup bagi pemeluk agama yang berbeda di Indonesia. Islam menunjukkan hubungan yang sangat baik dengan individu-individu.

---

<sup>97</sup> Warno, *Pandangan Abdurahman Wahid terhadap Pancasila sebagai dasar Negara*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 60.

<sup>98</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahan*, Qs. An-nahl [16]; 22.

<sup>99</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahan*, Qs. An-nahl: [16] 51.

Kedudukan Pancasila dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan pemikiran Negara merupakan kemenangan bagi umat Islam Indonesia. Lalu siapa yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam Pancasila? Ketegasan siapa yang dimaksud Tuhan dalam prospektus fundamental Pancasila mengisyaratkan peluncuran UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan: negara bebas". adalah ketuhanan yang tersirat dalam peraturan utama.<sup>100</sup>

“Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan sumber tauhid dalam syariat Islam, setiap manusia memiliki potensi dalam bertuhan yaitu berpikir dan berzikir dalam rangka mengembangkan misi sebagai *khalifah fil-ardhi*, juga keyakinan yang keyakinan yang terkadang tidak bisa di ungkapkan, yaitu kekuatan yang maha kuasa, sebuah kekuatan di atas kebendaan yang fana. Hakikah tauhid sangat jelas tertuang dalam ayat berikut.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

Artinya. “ Katakanlah; dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah tuhan yang kepadanya segala sesuatu bergantung. Dia tidak beranak dan tidak pula di peranakan, dan tidak ada stu orang pun yang setara dengannya. (Q.S Al-Ikhlâs: 1-4).<sup>101</sup>

## 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sifat manusia dalam sila kedua Pancasila mengenal sifat manusia yang kurang memperhatikan jati diri, agama, bangsa dan negara. Umat manusia melampaui batas publik. Ini adalah mentalitas untuk menganggap kualitas manusia dengan sengaja. Kualitas manusia menolak watak hawkish yang berfokus pada realitas dirinya sendiri dibandingkan dengan orang lain. Kepedulian terhadap manusia ini ditunjukkan dengan sikap manusia yang adil dalam berperilaku. Masuk akal untuk dirinya sendiri, masuk

<sup>100</sup> Fokky Fuad, *Islam dan Ideologi Pancasila, sebuah dialektika*, Lex Jurnalic, 9, no 3, 2012, 165.

<sup>101</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Q.S Al-Ikhlâs: 1-4,604

akal untuk orang yang berbeda. Karena gagasan ekuitas dikenang karena gagasan tentang Tuhan.

Berkenaan dengan manusia yang sederhana dan memanusiakan, Islam juga mengintegrasikan nilai-nilai, khususnya gagasan keadilan yang merupakan sifat utama Allah yang harus diteladani oleh manusia. Sifat yang dibangun adalah sesuatu yang bertentangan dengan sifat menindas. Lebih lanjut, sifat adil dan manusiawi tersebut secara tegas tertuang dalam firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) untuk bertindak secara sah dan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, untuk menafkahi anggota keluarga, dan Allah melarang dari melakukan laknat, kejahatan dan niat buruk. Dia memberimu perumpamaan agar kamu dapat mengambil contoh*”. ( Qs. An-Nahl [16]: 90)<sup>102</sup>

Bagian di atas adalah permintaan untuk bertindak adil dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang berasal dari Allah SWT, untuk bertindak adil dan melakukan sesuatu yang berguna. Keduanya adalah perintah yang setara dan disesuaikan, di mana seseorang berkewajiban untuk bertindak adil dan mencapai sesuatu yang bermanfaat. Perspektif dan perilaku manusia yang adil dan tercerahkan merupakan gambaran gagasan tentang Tuhan Yang Maha Kuasa yang sederhana dan terpuji bagi para pekerja-Nya. Merek dagang ini harus ditiru oleh individu Indonesia yang menjamin keadilan dan kesopanan sebagai filosofi. Falsafah kemanusiaan yang menitikberatkan pada penghormatan terhadap manusia dalam rangka mengakui keesaan Tuhan merupakan penjabaran dari *hablum minallah* dan *hablum minanas* dalam sistem kepercayaan pancasila. Orang-orang menganggap diri mereka sebagai

---

<sup>102</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahan, Qs. An-Nahl [16]: 90*

ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa dan sekaligus meniru gagasan keadilan dan kebaikan.<sup>103</sup>

### 3. Persatuan Indonesia

Ketabahan Indonesia yang merupakan Undang-undang ketiga Pancasila menunjukkan kepada dunia bahwa ketabahan merupakan pembenaran atas tindakan Daerah Indonesia. Ketabahan Indonesia menurut sudut pandang yang terbatas, namun menurut sudut pandang yang luas, bahwa seluruh rakyat Indonesia dibatasi oleh satu kesatuan geografis yaitu Wilayah Indonesia. Kemungkinan ketabahan dalam konstruksi keteladanan Islam mengkonsolidasikan Ukhwah Islamiyah (keteguhan antar individu umat Islam) dan kemudian Ukhwah Insaniyah (ketabahan sebagai individu umat Islam). Kedua pemikiran ini harus tetap terjalin erat untuk mewujudkan masyarakat yang berkenan, jauh dari perpecahan dan konflik karena perbedaan agama, suku, dan ras. Islam secara andal menjunjung tinggi pentingnya ketabahan sebagaimana dikomunikasikan dalam Ungkapan Allah SWT:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا<sup>103</sup> وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: “Selanjutnya, pegang erat-erat tali (agama) Allah, dan jangan dikucilkan, dan ingatlah ridha Allah kepadamu ketika kamu adalah musuh sebelumnya (jam Jahiliyah), maka pada saat itu, Allah menyatukan hatimu, kemudian, pada saat itu, Anda menjadi atas izin Allah, individu bersaudara, lebih jauh lagi, Anda telah berada di tepi jurang kesengsaraan, maka, pada saat itu, Allah menyelamatkan Anda darinya. Syair-syairnya untukmu, agar kamu terarah (Qs. Ali Imran[3]:103)<sup>104</sup>

### 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan /perwakilan.

---

<sup>103</sup> Fokky Fuad, *Islam dan Ideologi Pancasila, sebuah dialektika*, Lex Jurnalic, 9, no 3, 2012167

<sup>104</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahan, Qs. Ali Imran[3]:103*

Ketetapan keempat, yang menggarisbawahi pentingnya kehidupan sehari-hari dalam pemikiran, sesuai dengan sisi positif pelajaran Islam. Sikap cerdas dalam mengurus suatu masalah adalah dengan musyawarah. Pertimbangan adalah cara paling ideal untuk menemukan jawaban di mana masing-masing pihak tetap pada level yang sama tanpa perbedaan. Konsekuensi dari perenungan adalah pemahaman agregat yang harus dilengkapi dengan kebenaran penuh. Gagasan pertimbangan Islam dalam menangani suatu masalah dikenal sebagai syura (konsultasi). Pemikiran ini tercermin dalam firman Allah SWT:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَضَوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka itu adalah akibat langsung dari kebaikan Tuhan bahwa Anda bersikap lembut terhadap mereka. Dengan asumsi bahwa Anda kejam dan tidak sopan, jelas mereka akan menghindari Anda. Dengan cara ini maafkan mereka, mohon belas kasihan untuk mereka, dan berbicaralah dengan mereka mengenai situasi ini. Maka ketika kamu telah mengambil keputusan, maka saat itu bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat menyayangi orang-orang yang bertawakal kepada-Nya (Qs. Ali-Imran [3]: 159).<sup>105</sup>

##### 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam setiap ketetapan Pancasila kebetulan mengandung sifat-sifat Islami, sebagai ketetapan kelima yang juga menunjukkan adanya pemerataan selama waktu mengawasi Negara. Pemerataan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia apapun yang terjadi karena perbedaan agama, ras, identitas, dan lain-lain. Ketentuan hak-hak sipil bagi seluruh rakyat Indonesia pada tingkat fundamental menekankan bahwa tidak boleh ada kekurangan dalam Indonesia yang merdeka. Secara khusus, hak-hak sipil menggarisbawahi standar ekuitas dan bantuan keuangan pemerintah. Lebih spesifiknya, keadilan, kebebasan dan dukungan yang diinginkan oleh negara terletak

---

<sup>105</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahan*, Qs. Ali-Imran [3]: 15.

pada masalah legislatif, tetapi juga di bidang keuangan. Hak-hak sipil berarti mencapai keharmonisan antara kehidupan rahasia individu dan kehidupan daerah setempat.<sup>106</sup>

Pancasila secara religius menunjukkan secara nyata hubungan hubungan konseksual antara hablumminallah dan hablumminnas. Ini menyiratkan bahwa pengabdian seorang penyembah sebagai pekerja Tuhan mendorong dan secara langsung memengaruhi pengabdian dalam hubungan sosial yang bertingkat. Kedua sudut ini menyusun keseimbangan pelajaran Islam. Oleh karena itu, yang seharusnya menjadi renungan umum kita adalah bahwa nilai-nilai Pancasila tidak bermasalah bahkan tidak layak dengan Islam. Keputusan sebagai negara negara sebagai solidaritas dipandang benar-benar memastikan bantuan pemerintah secara mengejutkan. Karena dalam gagasan negara kesatuan terkandung unsur-unsur persatuan (solidaritas) dan solidaritas (solidaritas). Jiwa persatuan adalah persaudaraan, sedangkan solidaritas mengandung perhatian dan menghargai keragaman. Seperti yang digambarkan dalam ekspresi Tuhan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Oh man! Sesungguhnya Kami jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bermarga-marga agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling terhormat di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Tuhan sungguh maha mengetahui dan maha menyelidiki. Pertanyaan. [49] (QS.Al-Hujarat: 13).*<sup>107</sup>

Selain itu, untuk mempertahankan keberlangsungannya sebagai sebuah negara, Indonesia menerapkan aturan-aturan konservatif sebagai rencana bernegara. Bentuk pemerintahan yang berdaulat oleh rakyat dan dipimpin oleh seorang presiden. Secara etimologis “re” berarti kembali, dan “publik” berarti masyarakat atau kepentingan umum. Oleh karena itu, sah-sah saja negara moderat mengedepankan

---

<sup>106</sup> MK Ridwan, *penafsiran Pancasila dalam prepektif Islam: peta konsep integrasi*, Dialogia, 15, no 2, 2017.219.

<sup>107</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahan, Qs. Al-hujarat [49]: 13*

rakyat dan kepentingan umum (almashalah al-'ammah) sebagai tujuan krusial dan menjadi tujuan etis dalam menggerakkan negara. Artinya, Pancasila adalah teodemokrasi, yang secara tegas merupakan permulaan kekuasaan negara yang terbagi menjadi tiga pemikiran; pertama, kekuasaan, yang tercermin dalam bagian 1 dan 4 (Surgawi dan kekuasaan individu); kedua, proses, tercermin dalam pasal 2 dan 3 (rakyat dan marga); Ketiga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 (hak-hak sipil), hal ini mengandung makna bahwa berdirinya Pancasila sebagai negara teodemokrasi mengandung subordinasi kekuasaan kepada Tuhan dan individu. Selanjutnya, Pancasila sebagai negara teodemokrasi memerlukan kekuasaan yang dibatasi oleh Tuhan dari “atas” (dalam Islam disebut syariat) dan dibatasi “bawah” oleh manusia.<sup>108</sup>

Akibatnya, administrasi tidak dapat bertindak secara acak. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa Pancasila adalah suatu bentuk generalisasi Islam, khususnya sifat-sifat yang pada umumnya dapat diakui oleh setiap orang. Hal ini mengandung arti bahwa secara rasional sifat-sifat filosofis yang terkandung dalam Pancasila tidak terlepas dari pelajaran agama Islam atau agama yang berbeda. Bahkan berisi mimpi tentang pelajaran Islam. Dengan demikian, cara yang paling umum untuk menyelaraskan kualitas Islam dengan Pancasila adalah signifikan, sebagai tahapan dalam membangun negara Indonesia yang unggul.<sup>109</sup>

## **B. Nilai-Nilai Universalisme Islam dalam Pancasila Menurut Mohamad Natsir**

Mohammad Natsir mengkomunikasikan pandangan moderat tentang Pancasila. Natsir melihat persoalan Pancasila hanya soal pemahaman. Dia mengatakan bahwa pertemuan yang berbeda tidak boleh menyebabkan terjemahan yang

---

<sup>108</sup> MK Ridwan, *penafsiran Pancasila dalam prepektif Islam: peta konsep integrasi*, Dialogia, 15, no 2, 2017, 221.

<sup>109</sup> MK Ridwan, *penafsiran Pancasila dalam prepektif Islam: peta konsep integrasi*, Dialogia, 15, no 2, 2017, 221.

bertentangan dengan Pancasila dengan Islam. Dia yakin para penyusun Pancasila yang transenden Muslim tidak akan membentuk apa pun yang bertentangan dengan Islam ketika Pancasila mereka ditawarkan pada 1945.<sup>110</sup>

Pada saat memperingati Nuzulul Qur'an tahun 1954, Natsir memberikan ungkapan positif bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Logikanya, Natsir menanyakan nilai-nilai apa dalam perjuangan Pancasila dengan Islam? Mulai dari ketetapan Ketuhanan Yang Maha Esa, umat manusia, umat manusia, solidaritas, kepedulian, dan hak-hak sipil, semuanya berlaku untuk pelajaran Islam. Menurutnya, Pancasila bukanlah hal yang asing bagi Islam, selama ia diuraikan dengan cara yang tidak tepat. Natsir menegaskan, Pancasila hanyalah sebuah rencana. Rancangan ini berwawasan ajaran Islam, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tanda tauhid, dalam hal hak sipil berwawasan ihsan binaannas bahwa Pancasila adalah segala sesuatu yang dianggap sisa-sisa ajaran Islam yang menyedihkan.<sup>111</sup>

Natsir juga mengingatkan, betapapun relevannya Pancasila dengan Islam, bukan berarti Pancasila itu Islam atau Islam itu Pancasila, keduanya tetap unik. Menurutnya, Islam lebih luas dari lima ketetapan dalam Pancasila, kelima ketetapan itu hanya menggambarkan sepenggal pelajaran Islam.<sup>112</sup>

Mohammad Natsir adalah seorang individu yang dengan tegas berpegang teguh pada pelajaran-pelajaran keislaman yang ia dapatkan dari tokoh-tokoh politik Islam. Memang sekitar waktu itu Natsir membela Islam di Majelis Konstituante yang mengkaji persoalan-persoalan fundamental Negara, sekitar waktu itu Natsir menjadi

---

<sup>110</sup> Dadan Wildan, *Negara Pancasila vis-avis Negara Islam pemikiran politik m. natsir dan m. isa anshary (1945-1960)*.(Garut: STAIPI,2019),117.

<sup>111</sup> Dadan Wildan, *Negara Pancasila vis-avis Negara Islam pemikiran politik m. natsir dan m. isa anshary (1945-1960)*.(Garut: STAIPI,2019),117.

<sup>112</sup> Dadan Wildan, *Negara Pancasila vis-avis Negara Islam pemikiran politik m. natsir dan m. isa anshary (1945-1960)*.(Garut: STAIPI,2019),118.

ketua Partai Islam Masyumi dan pada waktu itu dia punya tanggung jawab besar terhadap Islam.

Sesuai Natsir Pancasila adalah penegasan harapan dan cita-cita kebaikan yang wajib kita penuhi dalam bernegara. Demikian dengan anggapan yang diusung adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menekankan bahwa manusia tidak dapat memulai hidupnya menuju cita-cita dan kebesaran sebelum mereka dapat menggerakkan dan mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pada saat itu bagaimana mungkin Qur'an bertentangan dengan ketetapan ini. Lebih lanjut, Natsir mengungkapkan, akan menjadi soal alternatif dengan menganggap ketetapan Ketuhanan Yang Maha Esa hanyalah ungkapan mulut bagi seseorang yang jiwanya sarat dengan keganjilan terhadap agama.

Dimana dalam artian jika undang-undang dasar tidak berfungsi maka undang-undang berikutnya tidak dapat berjalan karena pada umumnya undang-undang induk merupakan urat nadi tersendiri bagi undang-undang berikutnya sehingga pancasila menjadi kosong dan kabur dan apa yang tersisa hanyalah struktur Pancasila. Natsir mendekati umat Islam untuk tidak menentang Pancasila, dan menurut seorang Muslim rencana Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Namun tidak berarti bahwa Pancasila menyatu dengan setiap ajaran Islam.

Tepat pada tanggal 2 April 1952 Natsir berpidato di hadapan Pakistan Organization of World Undertakings, Karachi sebagaimana dikutip Munawir Sjali dalam bukunya yang berjudul Apa dan Bagaimana Umat Islam Dapat Menambah Pemenuhan Harmoni Dunia yang Mantap. Dalam wacananya yang membaca dengan teliti:

Pakistan jelas merupakan Negara Islam baik dalam hal penduduknya (yang beragama Islam) dan mempertimbangkan Islam sebagai alasan pilihan Negara. Selain itu, Indonesia merupakan negara Islam yang berpandangan bahwa Islam sebagai agama bagi masyarakat Indonesia, meskipun konstitusinya tidak dirancang sebagai agama,

namun Indonesia tidak memisahkan agama dengan negara. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan inti dari Pancasila Indonesia yang menjadi landasan moral dan etika bagi bangsa lain. Oleh karena itu, baik di negara kita maupun di keluarga kita, Islam mempunyai tempat yang sangat penting dalam kehidupan kita, namun hal ini tidak berarti bahwa sistem negara kita adalah pemerintahan yang ketat.

Selanjutnya sambil membandingkan setiap ketentuan dan Al-Qur'an yang dimuat dalam karangannya di majalah *Shrewdness*, 29 Mei 1954, dengan cara bicara Natsir bertanya kepada Al-Qur'an:

1. Seseorang yang memancarkan monoteisme, dapatkah disimpulkan melawan Tuhan yang tak tertandingi?
2. Mereka yang pelajarannya penuh dengan komitmen untuk mempertahankan apakah ijtima'iyah mengatakan ijtima'iyah dapat disimpulkan perjuangan dengan hak-hak sipil?
3. Yang benar-benar menghancurkan kerangka abad pertengahan dan pemerintahan istibdad (tirani) yang tidak menentu, dan membangun fondasi masyarakat dalam rancangan pemerintahan, dapatkah menyimpulkan perjuangan dengan apa yang disebut kekuasaan terkenal?
4. Siapa yang mempertahankan istilah islahu bainan nas (harmoni antar individu) dapat menyimpulkan perjuangan dengan identitas?
5. Siapa yang mengakui keberadaan negara dan menetapkan titik awal yang kokoh untuk etnisitas, dapat disimpulkan dapat dianggap bertentangan dengan identitas?<sup>113</sup>

Berikut adalah penjelasan mengenai Nilai-Nilai Islam pada sila-sila yang terdapat pada Pancasila:

1. Sila Ketuhanan yang Maha Esa

---

<sup>113</sup> Muhammad Natsir, *Islam sebagai dasar Negara*, (Jakarta: sega sary, 2004),30.

Natsir memandang Pancasila sebagai suatu gagasan yang komprehensif, yang mencerminkan sifat-sifat umum yang dapat diakui oleh semua orang, termasuk umat Islam. Dari relatif banyaknya undang-undang yang ada, Natsir berpendapat bahwa undang-undang primer merupakan undang-undang pokok dalam Pancasila. Oleh karena itu, jika undang-undang utama dipertahankan, kebebasan dan komitmen umat Islam akan terpenuhi. Karena substansi Pancasila tidak bergumul dengan pelajaran Al-Qur'an. Dalam pandangan Natsir, Pancasila sangat erat hubungannya dengan Al-Qur'an, bahkan hubungan antara Pancasila dan Al-Qur'an sangat jelas. Ini adalah upaya untuk mengkontraskan cara pandang para patriot arus utama yang mengartikan Pancasila sebagaimana ditunjukkan oleh cara pandang mereka. Hal inilah yang menyebabkan Natsir perlu mensurvei bahwa Pancasila sesuai dengan ajaran Islam dan Alquran. Natsir membahas ketetapan mana yang bertentangan dengan Alquran.

Tepatnya pemahaman Natsir bisa saja menafsirkan Pancasila jauh melampaui anggapan masyarakat sekitar saat itu. Dia jelas bukan tokoh Islam moderat yang sering memikirkan pertemuan Islam. Dia adalah seorang ulama dan pembaharu Islam. Alasannya sangat moderat, bisa dikatakan sangat liberal. Dalam mengemukakan pendapatnya tentang keselarasan antara Pancasila dan Islam, Natsir tidak serta merta mengungkap bagian-bagian Alquran yang terkait dengan Pancasila. Sekedar anjuran lafdziyyah bahwa di dalam Al-Qur'an, butir-butir dalam Pancasila tidak dapat disangkal terkandung di dalam Al-Qur'an. Seperti sila pertama yang memiliki keterkaitan dengan surah Al-Ikhlâs. Natsir menjamin ketetapan pokok tidak boleh bertentangan dengan Alquran yang mengandung tauhid.

Bagaimana Natsir memaknai Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dianggap mengangkat nilai monoteisme sebuah negara. Padahal sebenarnya ada tujuh

kata yang dihapus, yakni "dengan komitmen menyempurnakan syariat Islam bagi pemeluknya". Bagi Natsir, nilai tauhid harus ditanamkan sejak dini, sama halnya dengan anaknya. Jika dijiwai, malapetaka akan dijauhkan karena hubungan dengan Sang Pencipta dan hubungan baik dengan manusia. Selain itu, ia juga akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin. Hal ini diungkapkan dalam Al-Imran bait 112 Alquran. Oleh karena itu, ketetapan-ketetapan utama Pancasila dipahami berdasarkan bagian-bagian Al-Qur'an. Jika disebut dengan paham tauhid, tentunya Ketuhanan Yang Maha Esa harus dibarengi dengan persiapan untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya.

Namun, kebetulan saja, undang-undang pokok itu sebenarnya tidak secara sempurna menggambarkan gagasan tauhid di dalamnya. Natsir juga menggarisbawahi pentingnya menjaga keselarasan antara Pancasila dan Alquran. Menurut dia, jika ada perselisihan antara keduanya, Alquran harus menjadi aturan utama. Bagaimanapun, dia juga percaya bahwa Pancasila, hasil perjuangan dan pemahaman bersama seluruh negeri Indonesia, adalah alasan politik yang signifikan untuk mengarahkan keberadaan negara dan negara.<sup>114</sup>

Natsir bahkan bersuara agar umat Islam tidak menyamakan Pancasila dengan Islam, kata Natsir:

*Menurut seorang Muslim, perincian Pancasila tidak tampil sebagai barang asing yang bertentangan dengan pelajaran Al-Qur'an, ia menemukan kesan di dalamnya tentang apa sekutunya. Namun, tidak berarti bahwa Pancasila tidak dapat dibedakan atau mengandung setiap ajaran Islam.*

Natsir menerima bahwa di bawah lindungan Alquran Pancasila akan tumbuh subur. Satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan namun tidak dapat dibedakan dengan cara yang sama. Natsir mengakui bahwa di atas kotoran dan lingkungan Islamlah Pancasila akan memiliki tubuh yang subur. Namun, menurut dia, akan muncul

---

<sup>114</sup> Kuliah Al Islam, Sila Pertama Prespektif Mohammad natsir, <https://www.kuliahislam.com/2023/06/sila-pertama-perspektif-mohammad-natsir.html?m=1>, diakses pada tanggal 11 Juli 2022.

persoalan jika ketetapan Ketuhanan Yang Maha Esa hanya diktum bagi orang-orang yang sangat ragu-ragu dan sarat dengan keganjilan terhadap agama Pancasila, maka akan mati. Jika undang-undang dasar yang pada dasarnya telah jatuh, seluruh isi Pancasila akan kosong, tidak memiliki struktur tertentu. Yang tersisa hanyalah struktur Pancasila yang luar biasa mudah digunakan untuk melingkupi setiap langkah kegiatan yang tanpa ketetapan, bukan pula secuil imajinasi moral.

Secara gamblang, Natsir mengakui bahwa berdasarkan Ekspres Pancasila, keistimewaan dan komitmen umat Islam sebagai warga negara maupun umat Islam akan terpenuhi. Karena butir-butir dalam Pancasila tidak bertentangan dengan pelajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, Pancasila akan tumbuh dan berkembang di bawah lindungan Islam. Dengan begitu, umat Islam bisa mengakui Pancasila secara meyakinkan.<sup>115</sup>

## 2. Sila kedua dan kelima tentang keadilan

Bagi Natsir, sila kedua dan kelima Pancasila sudah sesuai dengan ajaran Islam. Itu tentang pemerataan. Islam dengan tegas mewajibkan 'adalah Ijtima'iyah (kesetaraan agregat). Seperti pada Al-Qur'an surat An-Nisa bait 58.

لِنَّ اللّٰهٖ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّواْ الْاٰمَنَاتِ اِلٰى اٰهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ لِنَّ اللّٰهٖ نِعَمًا يَّعْظُمُكُمْ بِهٖ ۗ لِنَّ اللّٰهٖ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

Artinya: “Yang pasti, Allah berpesan agar Anda menyampaikan perintah tersebut kepada individu yang berhak, dan ketika Anda menetapkan hukum antar individu, Anda harus menetapkannya dengan adil. Yang pasti, Allah-lah sebaik-baiknya yang mendidikmu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nisa: 58).<sup>116</sup>

Klarifikasi Natsir atas kedua undang-undang ini terbilang singkat dan tidak meluas ke topik ini. Namun yang menjadi perhatian utama adalah bahwa Hak Sipil

<sup>115</sup> Muhammad Natsir, *Islam sebagai dasar Negara*, (Jakarta: sega sary, 2014),31.

<sup>116</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahan*, (QS. An-Nisa: 58)

bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah satu kesatuan dengan pelajaran Islam. Kemudian, pada titik itu yang menjadi titik fokus dari persoalan istilah al-'adaalah ijtima'iyah adalah pemerataan agregat bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilihat dari pengulangan oleh Natsir. Dengan asumsi ketetapan kelima ini dihubungkan dengan pasal-pasal Alquran di atas, berarti ketetapan ini benar-benar bergantung pada penguasa itu sendiri. Karena individu tidak memiliki strategi untuk memilih kasus. Apakah orang Indonesia adil atau tidak, tergantung pada pilihan para ahli. Penguasa untuk situasi ini harus berada di tengah, bukan ke kiri atau ke kanan. Dengan demikian al-is ijtima'iyah akan muncul, dalam hal penguasa dapat melakukan keadilan dalam memilih perkara. Individu hanya menjadi objek dari setiap pilihan yang diambil oleh para spesialis.<sup>117</sup>

### 3. Sila tentang Permusyawaratan Perwakilan

Apalagi dengan undang-undang yang terkait dengan kekuasaan yang dimiliki individu. Dalam Islam yang pasti adalah energi. Islam tidak membutuhkan pemerintahan yang primitif dan istibdad (tiran). Memang, dalam menyimpulkan suatu perkara pun, Islam mendidik pertimbangan. Natsir menempuh jalan panjang untuk menerapkan standar-standar Islam ke ranah politik sebuah negara terdepan melalui metodologinya yang masuk akal. Pemikiran-pemikiran Natsir secara umum berusaha untuk berpikir dua kali tentang faktor-faktor riil dunia maju dan persoalan-persoalan substansial yang dilihat oleh negara Indonesia. Natsir meremehkan realitas politik yang terjadi saat itu. Bagaimanapun, pengakuan ini harus didasarkan pada kewajaran atau tidak bertentangan dengan pelajaran Islam. Salah satu modelnya adalah parlemen dimana kerangka kerja multi partai. Kemudian, pada saat itu, aturan merenungkan

---

<sup>117</sup> Yan Yan Nurdin , Eni Zulaiha, *Menimbang Kesesuaian Pancasila Dengan Al-Quran : Studi Perspektif Muhammad Natsir*, Khazanah Pendidikan Vol 2, No 1, 2020, 37.

dapat diterapkan pada kerangka tersebut. Padahal, pedoman renungan serta kerangka khilafah pada masa Nabi dan Sahabar bisa diterapkan pada kerangka ini.<sup>118</sup>

Prinsip musyawarah yang dimaksud oleh Natsir digali dari salah satu ayat dalam Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَضَوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ  
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Jadi, ini merupakan akibat langsung dari kemurahan Tuhan sehingga Anda bersikap lembut terhadap mereka. Mereka tentu saja akan menjauhi Anda jika Anda bertindak kasar dan kasar. Oleh karena itu maafkan mereka, mohon rahmat bagi mereka, dan bicaralah dengan mereka mengenai situasi ini. Taruhlah imanmu kepada Tuhan setelah kamu mengambil keputusan. Sesungguhnya Allah memuja orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. (QS. Ali Imran:159).<sup>119</sup>

Memahami pengulangan ini, Natsir berpendapat bahwa nilai musyawarah ini baik itu keluarga, daerah atau negara, harus dijaga dan dihayati. Karena, dalam kasus sedemikian rupa sehingga sebuah pilihan terkait dengan panggilan banyak orang, maka penguasa harus mendapatkan kesenangan dari orang-orang yang dia atur melalui pertimbangan sebelumnya. Ini adalah pengaturan yang keras dalam Islam (Muhammad Natsir, 2019). Pertimbangan adalah salah satu pendidikan dalam membangun negara. Bahkan Nabi Muhammad dan rekan-rekannya pada umumnya berdialog, ketika seluruh dunia di sekitar saat itu bermandikan wilayah penindasan, feodalisme, pemerintahan dan tirani. Islam dengan kaidah pemikirannya telah unggul dalam memberikan keragaman tersendiri dalam menjalankan pemerintahan.<sup>120</sup>

#### 4. Sila Persatuan Indonesia

Menurut Natsir, nilai terbesar di negeri ini adalah cinta tanah air. Kasih sayang ini adalah naluri manusia yang harus didukung dan dijaga agar negara ini terus terjaga.

<sup>118</sup> Yan Yan Nurdin , Eni Zulaiha, *Menimbang Kesesuaian Pancasila Dengan Al-Quran : Studi Perspektif Muhammad Natsir*, Khazanah Pendidikan Vol 2, No 1, 2020, 38.

<sup>119</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahan*, (QS. Ali Imran:159).

<sup>120</sup> Yan Yan Nurdin , Eni Zulaiha, *Menimbang Kesesuaian Pancasila Dengan Al-Quran : Studi Perspektif Muhammad Natsir*, Khazanah Pendidikan Vol 2, No 1, 2020, 39.

Memang, bahkan dalam Islam, ia mendesak kerabatnya untuk menghargai negaranya. Al-Qur'an menjawab demikian, khususnya surat al-Hujurat bait 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ

*Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bermarga-marga dengan tujuan agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling terhormat di antara kamu menurut Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Yang pasti, Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. (QS. Al-Hujarat:13)<sup>121</sup>*

Dengan menghargai negara ini, keinginan untuk bergabung semakin membumi. Seperti yang ditunjukkan Natsir, bait ini menggarisbawahi hadirnya etnisitas. Lebih tegas dari itu, identitas tidak menghilangkan pertemuan etnis. Kehadiran perkumpulan etnis tidak perlu dihilangkan atau ditiadakan, melainkan menjadi suatu cara untuk mengenal dan mengenal satu sama lain. Dengan mentalitas seperti itu, jalan solidaritas Indonesia akan tercapai. Pengulangan itu dengan jelas menggarisbawahi bahwa negara-negara itu dibuat untuk alasan yang layak, untuk lebih spesifik bekerja sama. Tanpa orang lain Islam membutuhkan pelestarian negara dan negara sesuai naluri manusia. Bagaimanapun, ini tidak berarti bahwa cinta publik tidak memiliki sisi negatif. Cinta seperti itu memengaruhi keangkuhan suatu negara, sifat hawkish, kefanatikan, dan kenofobia. Sifat seperti ini akan mendorong penduduknya menjadi negara yang sombong dan merasa paling terhormat di antara negara-negara lain.<sup>122</sup>

Natsir sampai pada resolusi bahwa tidak ada pertentangan antara Pancasila dan Islam selama setiap ketentuan yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan

---

<sup>121</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahan, Qs. Al-hujarat [49]: 13*

<sup>122</sup> Yan Yan Nurdin, Eni Zulaiha, *Menimbang Kesesuaian Pancasila Dengan Al-Quran : Studi Perspektif Muhammad Natsir*, Khazanah Pendidikan Vol 2, No 1, 2020, 40.

ajaran Islam. Hal ini terlihat dari tekad Natsir dalam membentengi Pancasila di hadapan dunia lokal saat berkesempatan mengunjungi harimau. Di sini cenderung dirasakan wilayah kekuatan untuk bagaimana pengabdian pada kepentingan negara. Ini terlihat dalam pertempuran sudut pandangnya sepanjang hidupnya. Dia tidak hanya fokus pada kepentingannya sendiri dan kelompoknya dengan mengorbankan kepentingan negara secara keseluruhan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN